

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN DAN TRIWULANAN
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara**

TAHUN 2018

Nomor : PK - 20 /PW33/6/2018
Tanggal : 19 Januari 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Makugawene, Kalumata, Ternate
Telepon (0921) 3110294, Faksimile (0921) 3110176

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Khaira Jaya
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Denpasar, 19 Januari 2018

Pihak Pertama,

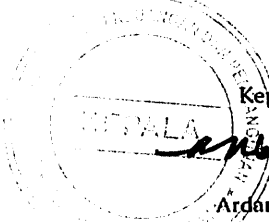
Indra Khaira Jaya
NIP 19681231 199303 1 001

REKAM LAYANAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI


NAMA PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	3	4
A. Sasaran Program		Indikator Kinerja Program			
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60	
		1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan kelas (NYC) kategori A	%	0	
		1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya dipredikat minimal A (baik)	%	0	
		1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	55	
2	Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	1.5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	55	
		2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	50	
		2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72	
		2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65	
		2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	
		2.5 Presentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	
3	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	75	
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52	
5	Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65	
6	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	
		6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	
		6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	60	
		6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	40	
7	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	
		7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0	
		7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	90	
		7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	10	
B. Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan			
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	56	
2	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	13	

		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	4.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	64
5	Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII	5.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan	Laporan	0
6	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan	6.1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	laporan	16
	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan	7.1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	laporan	21
A	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program			
1	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	8
B	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			
1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	46
2	Termanfaatkannya Aset secara optimal	2.1	Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP	unit	0
		2.2	Tersedianya alat pengolahan data BPKP	unit	2
		2.3	Tersedianya meubelair perwakilan BPKP	unit	0
		2.4	Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP	unit	52
		2.5	Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP	m2	80
		2.6	Tersedianya sarana prasarana BPKP	unit	0
		2.7	Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung	unit	0
		2.7	dst	unit	0

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp. 3.739.453.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp. 11.244.653.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp. 634.190.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp. 368.900.000,00
Jumlah	Rp. 15.987.196.000,00



 Kepala BPKP,
Ardan Adiperdana
 Ardan Adiperdana
 NIP.19590616 197911 1 001

Denpasar, 19 Januari 2018
 Kepala Perwakilan,

 Indra Khaira Jaya
 NIP 19681231 199303 1 001

*) bagi perwakilan yang bemitra dengan BUMN

PERENCANAAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2015
 PERWAKILAN BPEP PROVINSI MALUKU UTARA

1	2	TARGET	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
		Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
3	4	5	6	7	8		
A. Sasaran Program							
1. Perubahan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Indikator Kinerja Program						
	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	14	17	36	60	60
	1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	0	0	0	0	0
	1.3 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	0	0	0	0	0
	1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	0	25	0	55	55
	1.5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	0	25	0	55	55
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	12	24	36	50	50
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	18	36	54	72	72
	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	13	39	52	65	65
	2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	0	0	0
	2.5 Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	0	0	0
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	0	0	0	75	75
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	0	0	52	52	52
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem	%	0	20	40	65	65
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100	100	100
	6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	0	0	0	0
	6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	0	40	50	60	60
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	10	30	40	40
7. Meningkatnya Kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	0	0	0	100	100
	7.2 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0	0	0	0	0
	7.3 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	0	40	60	90	90
	7.4 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	0	10	10	10	10

1	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	Laporan	3	3	3	3	4	13
2	Tersedianya informasi hasil pengawasan penceraian BUMIA di seluruh perwakilan	Laporan	0	1	1	1	1	3
3	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	Laporan	15	3	20	26	64	64
4	Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII	Laporan	0	0	0	0	0	0
5	Tersedianya informasi hasil pembinaan SHIP perwakilan	laporan	2	3	4	7	16	16
6	Tersedianya informasi hasil pembinaan SHIP perwakilan	laporan	5	5	5	6	21	21
Sasaran Program								
Indikator Kinerja Program								
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasa atas Pelayanan Sekretariat Utama	skala	0	0	0	8	8	8
Sasaran Kegiatan								
1.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasa layanan	laporan	10	10	12	14	46	46
2.	Termanfaatkannya Aset secara optimal	unit	0	0	0	0	0	0
		unit	2	0	0	0	2	2
		unit	0	0	0	0	0	0
		unit	52	0	0	0	52	52
		m2	80	0	0	0	80	80
		unit	0	0	0	0	0	0
		unit	0	0	0	0	0	0
		unit	0	0	0	0	0	0

1.	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SHIP	Rp	579.245.000	1.051.322.900	1.388.064.900	720.820.200	3.739.453.000,00
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp	2.589.805.690	2.654.094.990	3.438.368.920	2.562.383.400	11.244.653.000
3.	Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp	155.454.000	176.250.000	146.250.000	156.226.000	634.190.000
4.	Pengaluan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp	26.000.000	129.200.000	192.300.000	21.400.000	368.900.000
Jumlah		Rp	3.350.504.690	4.010.867.890	5.164.983.820	3.460.839.600	15.987.196.000

Kepala BPKP,
Endangyatra
Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Denpasar, 19 Januari 2018
Kepala Perwakilan,
Ji
Indra Khaira Jaya
NIP 19681231 199303 1 001

*1 bagi perwakilan yang bermitra dengan BUMN